



Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Pada Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020

Shahril Budiman¹
Didi Kurniadi²
Raja Abumanshur Matrudi³
Billy Jenawi⁴
Junriana⁵

^{1,3,4,5}Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji, Indonesia.

²Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan, Indonesia.

Corresponding Author: shahril2204@gmail.com

Article Info

Keyword:

Keyword 1;
Regional Innovation
Keyword 2;
Local Government
Keyword 3;
Public Service
Keyword 4;
Governance

Abstract: *This study has the main objective of analyzing the achievement of regional innovation in Bintan Regency in the 2020 Regional Innovation Index which has been evaluated by the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia. In addition, this research can provide an overview of the existing conditions of regional innovation in Bintan Regency so that it can be used as material for policy evaluation for stakeholders of the Bintan Regency Regional Government in making breakthrough efforts to improve Regional Innovation in the future. A series of regional innovations covering public service innovations, governance and other forms of innovation in accordance with the areas of government affairs that become regional authorities have implications for the implementation of regional governance, especially in Bintan Regency. The achievement of Bintan Regency as the most innovative border area in Indonesia which was later awarded the Innovation Government Award by the Indonesian Ministry of Home Affairs certainly has its own achievements, especially the process of implementing regional innovation. The results of this assessment are then reviewed and analyzed again in this paper.*

Kata Kunci:

Kata kunci 1;
Inovasi Daerah
Kata kunci 2;
Pemerintah Daerah
Kata kunci 3;
Pelayanan Publik
Kata kunci 4;
Tata Kelola
Pemerintahan

Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis pencapaian inovasi daerah Kabupaten Bintan didalam Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020 yang telah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Selain itu melalui penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi eksisting inovasi daerah di Kabupaten Bintan sehingga dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan bagi pemangku kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam melakukan upaya terobosan meningkatkan Inovasi Daerah kedepannya. Serangkaian inovasi daerah yang meliputi inovasi pelayanan public, tata kelola pemerintahan hingga inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tentu berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di Kabupaten Bintan. Pencapaian Kabupaten Bintan sebagai daerah perbatasan terinovatif di Indonesia yang kemudian dianugerahi *Innovation Government Award* oleh Kementerian Dalam Negeri Indonesia tentu memiliki prestasi tersendiri terutamanya proses pelaksanaan inovasi daerah yang dilakukan. Hasil dari penilaiannya inilah yang kemudian direview dan dianalisa kembali didalam tulisan ini.

Article History: Received 19-Agustus-2021, Revised 25-September-2021, Accepted: 22-Oktober-2021

PENDAHULUAN

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi membawa transformasi didalam budaya pemerintahan untuk mengedepankan sistem yang kompetitif guna mencapai performa organisasi publik yang baik dalam perspektif tata kelola serta penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini tentu akan memerlukan serangkaian inovasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di era modern. Vries, Bekkers, & Tummers (2015) dalam (Andhika, 2018) memandang bahwa adanya inovasi didalam pemerintahan akan meningkatkan kualitas pelayanan lebih efektif dan efisien, sehingga inovasi kemudian dalam penyelenggaraan pemerintahan akan juga dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, pimpinan daerah, perangkat daerah dalam hal meningkatkan kualitas keputusan dan Tindakan (Aulia et al., 2019) (Wicaksono, 2019) (Sururi, 2019). Pada saat yang sama pula adanya inovasi akan berdampak pada kualitas pelayanan publik (Wismanu et al., 2018).

Global Innovation Index (GII) tahun 2020 yang dirilis oleh Cornell University, INSEAD, dan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menempatkan Indonesia pada peringkat 85 dari 131 negara dengan skor 26.49 (Skala 0-100) dibawah negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura yang masuk top 10 GII pada ranking 8 diikuti dengan Malaysia-33, Vietnam-42, Thailand-44, Philipina-50 dan Brunei Darussalam-71. Dalam GII 2020 Indonesia masuk dalam kategori negara dengan kategori *Lower middle-income Economics* (Dutta, S., Lanvin, B., & Wunsch-Vincent, S, 2020).

Posisi Indonesia dalam GII tersebut tentu menjadi refleksi tersendiri bagi pemerintah belum mampu mendorong ekosistem inovasi yang mumpuni hingga ke akar rumput bahkan jauh tertinggal dari negara-negara sahabat di Asia Tenggara. Komitmen didalam pembangunan inovasi tentu mesti dilengkapi dengan peta jalan serta semangat untuk mendorong seluruh elemen dalam sistem pemerintahan melakukannya tidak hanya dalam kapasitas sebagai stimulan namun juga sebagai inventor yang menjadi contoh bagi pelaku inovasi baik itu di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah.

Penyelenggaran pemerintah daerah dengan segala tantangan perubahan dan paradigma reformasi birokrasi, dan peningkatan daya saing daerah tentu kemudian menuntut adanya terobosan-terobosan yang inovatif sesuai dengan kewenangan kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti yang ditegaskan oleh (Kartika, 2018) bahwa untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik, lalu memperbaiki sistem tata kelola pemerintahannya dan melakukan inovasi sesuai dengan kewenangannya dibutuhkan peran pemerintah yang begitu besar. Matriddi (2021) juga menilai bahwa urgensi daripada Inovasi bagi pemerintah daerah sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Oleh karena itu setiap pemerintah daerah saat ini didorong untuk melakukan serangkaian terobosan penting sebagai upaya pembaharuan atau menciptakan kreatifitas sesuai dengan urusannya. Salah satunya dengan mengoptimalkan inovasi daerah yang merupakan komponen penting didalam wujud perkembangan tata kelola pemerintahan yang baik di era globalisasi. Hal ini berafiliasi dengan daya saing daerah, dimana inovasi kemudian berdasarkan riset Prasetyo (2020) memiliki kemampuan mendorong daya saing daerah yang kemudian daya saing daerah menjadi pijakan dalam penentuan kebijakan daerah.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang merupakan turunan dari pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sejatinya menjadi payung hukum kepada pemerintah daerah untuk membentuk lingkungan birokrasi yang inovatif, inilah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi khususnya pada UU 23/2014 pasal 386 yang menyatakan bahwa "dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah

Daerah dapat melakukan inovasi". Selanjutnya berkenaan dengan pelaksanaan inovasi, pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang dalam pasal 1 dijelaskan pula bahwa Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mendorong lahirnya inovasi daerah dari setiap provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia yang kemudian akan dilakukan penilaian terhadap masing-masing pemerintah daerah melalui Indeks Inovasi Daerah. Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

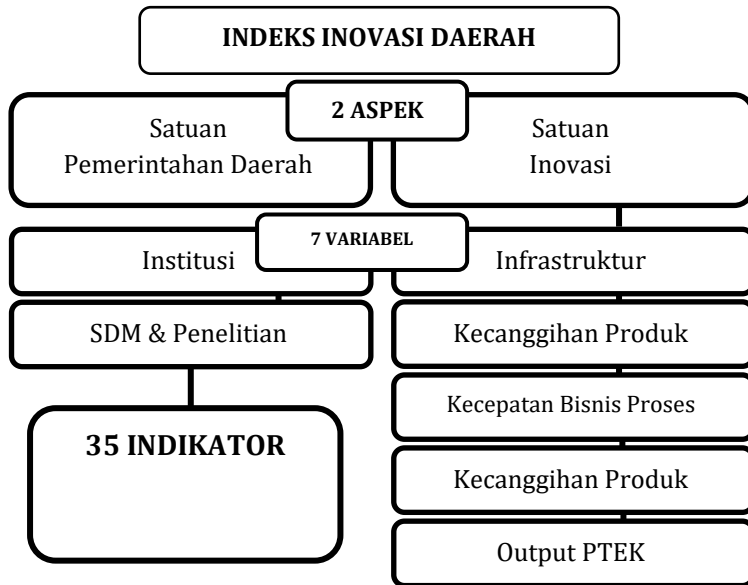
Atas dasar penilaian ini juga kemudian menjadi pemetaan terhadap Indeks Inovasi Daerah serta pemberian anugerah. Penilaian ini kemudian menjadi ajang bergengsi dalam anugerah *Innovative Government Award* (IGA) yang bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap usaha-usaha inovasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi serta kabupaten kota dalam melakukan inovasi didaerahnya.

Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2020 turut serta dalam melakukan pemetaan inovasi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 388 Ayat (7) tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah bahwa Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Bintan mesti melaporkan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri yang kemudian akan dilakukan penilaian inovasi daerah.

Untuk penilaian indeks inovasi daerah sejalan dengan *Inovative Government Award* (IGA) pada tahun 2020, ini berdasarkan surat dari Kementrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) Republik Indonesia Nomor 002.6/2866/SJ tertanggal 14 April 2020. Selanjutnya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri memberikan panduan bagi pemerintah daerah untuk pendaftaran, pengukuran dan penilaian secara mandiri inovasi daerah yang diusulkan melalui laman website indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/.

Didalam kerangka indeks inovasi daerah terdiri dari 2 aspek, 7 variabel dan 35 indikator sebagai penilaian setiap inovasi-inovasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah sebagaimana yang tertera pada gambar dibawah ini:

Gambar 1. Kerangka Indeks Inovasi Daerah



Namun begitu perjalanan dalam melakukan inovasi tak semulus apa yang menjadi harapan dalam melakukan inovasi daerah. Kegamangan dalam melakukan inovasi dalam lingkup organisasi perangkat daerah acapkali luput dari perhatian struktur birokrasi didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, hal ini dapat dipicu oleh beberapa hal yang notabene menjadi patologi birokrasi yang terjadi pula didalam inovasi daerah. (Hutagalung & Hermawan, 2018) melihat bahwa hambatan didalam pelaksanaan inovasi dapat berasal dari dalam maupun luar lingkungan organisasi, serta perencanaan inovasi itu sendiri dan para pelaksana inovasi.

Selain daripada itu pelaksanaan inovasi oleh perangkat daerah dapat diakibatkan dari "pakem" aturan yang begitu banyak dari penyelenggaraan pemerintahan sehingga usaha dalam melakukan inovasi kemudian tidak terpetakan dengan baik. Padahal banyak hal yang pada dasarnya merupakan bentuk inovasi namun tidak tercatat atau terdokumentasikan menjadi suatu inovasi daerah. Oleh karena itu, urgensi pemetaan inovasi mesti dilakukan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam rangka mengetahui perkembangan dari jalannya inovasi dan merangsang aparatur negara dalam melakukan inovasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbang) telah mengidentifikasi inovasi daerah yang ada di Kabupaten Bintan dalam rangka melakukan pemetaan sebagai bentuk konkritnya dilakukan melalui identifikasi serta usaha pendalaman karya inovasi yang dapat menjadi usulan inovasi daerah dalam indeks inovasi daerah. Usaha pemetaan inovasi daerah yang dilakukan oleh Bappelitbang Kabupaten Bintan dilakukan melalui program fasilitasi inovasi bekerjasama dengan institusi Pendidikan tinggi yang terdapat di Kabupaten melalui implementasi kerjasama *Government with Universty* (GwT). Ini juga dijelaskan oleh (Abdurahman, 2014) bahwa melalui pola jejaring, kerja sama antar daerah diikuti pula dengan subjek pembangunan mulai banyak dilakuka serta menjadikan ini suatu inovasi pembangunan yang dalam konteks kewilayahan memiliki peran strategis.

Tujuan dari penulisan ini pada dasarnya memberikan analisis terhadap kondisi eksisting pencapaian Pemerintah Kabupaten Bintan dalam Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2020 dan selanjutnya memberikan penilaian terhadap pemetaan inovasi daerah yang telah dilakukan sebagai bahan evaluasi perbaikan dalam implementasi kebijakan inovasi daerah khususnya

berkaitan erat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Hal ini selaras dengan tujuan inovasi daerah yaitu:

- a) Peningkatan Pelayanan Publik;
- b) Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c) Peningkatan daya saing daerah.

Implikasi dari pemetaan inovasi daerah yang telah dilakukan akan memberikan pembaharuan serta peningkatan nilai tambah daripada inovasi daerah yang telah ada serta mendorong penciptaan lahirnya inovasi-inovasi daerah lainnya di Kabupaten Bintan pada masa mendatang.

METODE

Adapun metode didalam penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisa data ini dilakukan terhadap data-data hasil indeks inovasi daerah yang dilansir oleh badan penelitian dan pengembangan (BALITBANG) Kementrian dalam negeri. Dari data tersebut kemudian dianalisa untuk menggambarkan tentang pemetaan hasil indeks inovasi daerah di Kabupaten Bintan pada tahun 2020. Data yang digunakan didalam penelitian ini memanfaatkan data yang dirilis oleh Balitbang kemendagri hasil daripada indeks inovasi daerah pada tahun 2020 dan hasil input sistem oleh Bappelitbang Kabupaten Bintan.

Didalam data indeks inovasi daerah tersebut sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya terdapat indikator SPD Kabupaten Bintan dan Indikator Inovasi Kabupaten Bintan. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Bintan, dengan alasan bahwa pada ajang IGA tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bintan mendapatkan penghargaan untuk kategori Kabupaten di Wilayah Perbatasan yang terinovatif. Selain daripada itu sebagai daerah yang karakteristik wilayahnya terdiri dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi daerah.

TEMUAN DAN HASIL

Dalam pemetaan Indeks Inovasi Daerah yang dilakukan oleh Balitbang Kemendagri mengklasifikasikan daerah-daerah menjadi 4 (Empat) yang terbagi atas daerah yang belum ada data, daerah kurang inovatif, daerah inovatif dan daerah terinovatif. Pemetaan inovasi ini yang diberikan penghargaan didalam *IGA Award* merupakan apresiasi pemerintah terhadap semangat daya upaya serta keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara inovatif. Berdasarkan dari pemeringkatan didalam Indeks Inovasi Daerah untuk Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau diketahui bahwa Kabupaten Bintan merupakan daerah yang memiliki peringkat terbaik dibandingkan dengan daerah lainnya, sebagaimana yang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Hasil Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020 di 7 Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau

No	Pemerintah Daerah	Jumlah Inovasi	Skor	Ranking Nasional
1	Kabupaten Bintan	72	7046	54
2	Kabupaten Natuna	28	3596	88
3	Kota Batam	43	2393	120
4	Kabupaten Karimun	6	80	318
5	Kota Tanjungpinang	15	56	345

6	Kabupaten Anambas	4	31	415
7	Kabupaten Lingga	7	3	460

Sumber: Data olahan penulis dari indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/

Posisi Kabupaten Bintan didalam indeks inovasi daerah jika ditinjau dari wilayah administrasi pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau menempati peringkat pertama diikuti oleh Kabupaten Natuna, Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga diurutan terakhir. Untuk Kabupaten Bintan hasil 7046 merupakan skor gabungan antara indikator SPD dan indikator inovasi daerah dan dari 72 inovasi yang diajukan 69 inovasi merupakan inovasi daerah sedangkang 3 (tiga) inovasi lainnya merupakan inovasi berkenaan dengan covid-19. Sedangkan untuk Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Indeks Inovasi Daerah menempati Ranking 101 dengan jumlah Inovasi sebanyak 37 serta skor 3080.

Jika ditinjau lebih dalam berdasarkan data tabel diatas banyaknya inovasi tidak pula berbanding lurus dengan peringkat indeks inovasi daerah secara nasional. Hal ini terlihat dari perbandingan jumlah inovasi yang dihasilkan oleh Kabupaten Natuna-28 Inovasi dan Kota Batam-43 Inovasi serta Kabupaten Karimun-6 Inovasi dan Kota Tanjungpinang-15 Inovasi. Hal ini dipengaruhi oleh skor penilaian terhadap inovasi daerah yang ada pada masing-masing bentuk inovasi daerah yang dilakukan. Skor inovasi ini diukur dari 21 indikator inovasi daerah dari setiap inovasi yang diajukan, setiap pemerintah daerah melakukan penilaian mandiri yang kemudian diverifikasi dan assessment.

Hasil Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintan

Pada tahun 2020 Kabupeten Bintan dapat mengidentifikasi sebanyak 69 inovasi daerah, dimana seluruh inovasi daerah tersebut masuk dalam proses penerapan. Selanjutnya 69 inovasi daerah Kabupaten Bintan ini diajukan pada tahun 2020 kedalam Indeks Inovasi Daerah. Dari 69 inovasi tersebut terbagi menjadi 3 (Tiga) kategori inovasi yaitu:

Tabel 2. Kategori Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020

No	Kategori Inovasi	Jumlah Inovasi
1	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	15
2	Inovasi Pelayanan Publik	15
3	Inovasi Bentuk Lainnya Sesuai Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah	39

Sumber: Data olahan penulis

Proses pemetaan inovasi yang dilakukan merupakan pelaksanaan kerjasama bersama perguruan tinggi dan dari hasil fasilitasi teknologi dan inovasi yang dilakukan oleh Bidang Inovasi dan Kelitbang Bappelitbang Kabupaten Bintan kepada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bintan.

Sebagai wilayah yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan pesisir, tantangan melakukan inovasi daerah tidaklah mudah. Usaha-usaha inovasi yang dilakukan baik itu oleh unit organisasi di pemerintah daerah selama ini memang belum terpetakan sebagai bentuk inovasi sebagaimana yang termaktub didalam peraturan perundangan yang ada. Usaha untuk melahirkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan pada level OPD dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan misalnya pada hari ini tidak lepas dari perkembangan revolusi industri 4.0 ,digitalisasi pemerintahan yang diikuti dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Konektivitas wilayah kepulauan di era global saat ini sangat mengandalkan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Keberadaan inovasi tata kelola pemerintahan di bintang saat ini meliputi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SIMONEV), E-Gemilang, E - Planning, E-Rapat, Data Bintang In Hand, Sistem Informasi dan Retribusi (SIMRET), Sistem Informasi Manajemen ASN Bintang (SIMANTAN), Sistem Ujian Bintang (SIJANTAN), Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang Wilayah (SIMTARU), Survey Kepuasan Masyarakat (SYKEMAS) dan lainnya berfungsi untuk meningkatkan manajemen mutu kinerja internal *government to government* (G2G) dalam rangka koordinasi dan komunikasi pemerintahan.

Disisi lainnya, inovasi bidang pelayanan publik menjadi urgensi utama agar penyediaan layanan kepada masyarakat baik itu barang maupun jasa publik sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM). Putra, R. M. D. (2018) pada risetnya tentang inovasi di Surabaya bahkan melihat bahwa inovasi bagi pemerintah daerah menjadi ukuran keberhasilan dari implementasi reformasi birokrasi.

Pada tahun 2020 terdapat 15 inovasi pelayanan publik di Kabupaten Bintan yaitu Paralegal, Kapal Pustaka Apung, Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas dan Rawat Inap Kelas III RSUD Bintan, Rumah Singgah Rujukan Luar Daerah, Poli Malam di Puskesmas Padat Penduduk (Poli Umum, Kebidanan dan Poli Anak), Posbindu PTM Mobile, Sistem Aplikasi Manajemen Pendidikan (SAMPAN), Serving the Villager, Percepatan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran Anak Usia 0-60 Hari, Transportasi Sekolah Gratis Kabupaten Bintan, Perlengkapan Sekolah Gratis Bagi Siswa Baru (TK/SD/SMP sederajat) dan lainnya. Pada dasarnya penerapan inovasi pelayanan public merupakan aktualisasi dari visi dan misi kepala daerah yang kemudian tertuang dalam RPJMD dan RKPD untuk diwujudkan oleh seluruh elemen pemerintahan.

Arus otonomi daerah dan desentralisasi didalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah ternyata berimplikasi terhadap Kabupaten Bintan didalam melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam melakukan inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hingga tahun 2020 terdapat 39 inovasi yang diterapkan yaitu Organisasi Kelitbangan Kabupaten Bintan (ORALIT), Secanting Beras, Budidaya Ulat Maggot Black Soldier Fly Secara Terpadu Desa Teluk Bakau, Sang Maestro (Alat Peraga KB Pria), Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSLU) Rumah Bahagia Bintan, Jantenkaya (Jaminan Ketenagakerjaan Kader Posyandu), Kartu Kendali Rekomendasi Pembelian Minyak Solar (Gas Oil), Desa Wisata, Bank Sampah, Fasilitasi dan Mediasi KUR bagi Usaha Mikro dan lainnya. Inovasi-inovasi ini dihasilkan pula oleh masyarakat, aparatur daerah yang berkolaborasi dengan perangkat daerah, perguruan tinggi, sektor swasta.

Seluruh inovasi saat ini merupakan hasil pemetaan mandiri daripada Bappelitbang Kabupaten Bintan bersama dengan OPD di Kabupaten Bintan. Disinilah peran Bappelitbangda sangat sentral dalam pengembangan inovasi daerah (Arifin & Sakti, 2017), (Yusuf et al., 2019), (Syamsuddin et al., 2020).

Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan tahun 2020 ini meningkat dari tahun sebelumnya di 2019. Adapun persoalan utamanya adalah kemampuan mengidentifikasi bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan yang ada sebagai inovasi daerah yang padahal selama ini telah dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun inisiasi dari masyarakat. Pada dasarnya dengan adanya inovasi akan memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bintan. Bahkan saat ini pada tatataran Desa telah ada bursa inovasi desa, Kabupaten Bintan melalui Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa.

Untuk Kabupaten Bintan sendiri berdasarkan hasil indeks Inovasi Daerah pada tahun 2020 menempati peringkat 54 nasional dengan rincian hasil penilaian skor Indeks sebagai berikut:

Tabel 3. Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2020

No.	Indeks	Skor
1	Indeks Rata-Rata Kabupaten	7046
2	Indeks Hasil Assesment*	6143
3	Indeks Hasil Verifikasi*	4543

*) skor yang dihitung berasal dari inovasi yang diimplementasikan dari tahun 2017 s/d 2019.

Sumber: *indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id*

Dari hasil pemetaan diketahui bahwa untuk indeks rata-rata kabupaten Bintang memiliki nilai 7046.00 yang merupakan akumulasi dari skor profil daerah ditambah dengan skor seluruh inovasi.

Untuk skor indeks hasil assessment 57 inovasi tersebut selanjutnya dilakukan penilaian inovasi daerah Kabupaten Bintang dengan hasil nilai 6143 yang merupakan skor kematangan. Kemudian dari skor indeks hasil verifikasi Kabupaten Bintang memiliki nilai final sebesar 4543, dimana skor (indeks hasil assessment dan hasil verifikasi) dihitung berasal dari inovasi daerah yang diimplementasikan dari tahun 2017 s/d 2019.

Penilaian Indikator Satuan Pemerintah Daerah

Dalam indeks inovasi daerah terbagi 2 (dua) indikator penilaian, pertama terkait dengan indikator Satuan Pemerintah Daerah (SPD) sebanyak 14 Indikator (Tabel 4) dan indikator Inovasi sebanyak 21 indikator (Tabel 5). 14 Indikator ini menilai kondisi daerah implikasi inovasi terhadap perkembangan pembangunan dan kemajuan daerah. dari sisi komitmen kepala daerah dinilai dari visi dan misi yang tentunya tertuang pula didalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. selanjutnya adalah lembaga kelitbangan, Kabupaten Bintang sendiri melalui Bappelitbang telah memiliki organisasi kelitbangan yang merupakan upaya dari "*collaborative think tank*" antara pemerintah daerah Kabupaten Bintang, Bappelitbang bersama tenaga kelitbangan dari perguruan tinggi dalam rangka menyikapi dinamika dan permasalahan yang berkembang di daerah yang kemudian dapat memberikan stimulus rancang bangun serta budaya riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. setidaknya ada 3 (Tiga) perguruan tinggi di wilayah pulau Bintang yang sudah bekerjasama yaitu STISIPOL Raja Haji, UMRAH dan STAIN SAR. Ini didorong penglibatan akademisi dalam proses pengambilan kebijakan serta memberikan masukan kepada kepala daerah serta OPD.

Model kolaborasi menjadi urgensi didalam inovasi. Mukhlis, B. M. (2018) memetakan paling tidak ada 4 (Empat) aktor utama dalam pengembangan sistem inovasi nasional yaitu:

- 1) Pihak pemerintah (baik pusat maupun daerah);
- 2) Perguruan tinggi;
- 3) Industri dan;
- 4) Komunitas yang ada di dalam masyarakat.

Serupa dengan apa yang dilakukan oleh Kota Bandung dalam melahirkan inovasi "*Bandung Creative City*" (Kunariyanti & Yuwono, 2019) yang melibatkan multi aktor untuk penguatan Bandung sebagai kota kreatif; Pola antar aktor dalam konsep Quadruple Helix pengembangan Desa Wisata Duren Sari di Kabupaten Trenggalek Muzaqi, (A. H., & Hanum, F, 2020); Provinsi Banten yang menggunakan pola kolaborasi inovasi dalam mendukung penguatan sistem inovasi unit pengolahan ikan Anggraeni, S. K., Sukardi, S., & Raharja, S. (2021). Strategi kolaborasi menjadi konektivitas pembangunan budaya inovasi dan mendorong terciptanya serta mengevaluasi inovasi dari berbagai aktor.

Sehingga tidak hanya berbasis kuantitas dari inovasi namun kualitas dari setiap inovasi memiliki mutu yang terus dapat ditingkatkan. Walaupun dalam proses penilaian IID ini sisi administrasi masih menjadi skala prioritas oleh balitbang kemendagri. Kelengkapan-kelengkapan ini juga mesti didukung platform kebijakan daerah serta kondisi riil

perkembangan daerah sebagaimana yang terdapat dalam indikator penilaian satuan pemerintah daerah.

Tabel 4. Hasil Penilaian Indikator SPD Kabupaten Bintan didalam Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020

No	Indikator	Ranking	Skor
1	Visi Misi	413	0
2	Tingkat Lembaga Kelitbangan	222	6
3	Jumlah Inovasi Daerah Yang Dihasilkan	217	3
4	Kualitas Peningkatan Perizinan	97	6
5	Jumlah Pendapatan Perkapita	270	4
6	Jumlah Lapangan Kerja	204	2
7	Jumlah Peningkatan Investasi	113	6
8	Jumlah Peningkatan PAD	79	6
9	Opini BPK	156	6
10	Nilai Capaian Lakip	130	4
11	Nilai IPM	171	6
12	Penghargaan Bagi Inovator	55	6
13	Optimalisasi CSR	229	1
14	Roadmap SiDA	147	4

Sumber: indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id

Berdasarkan penilaian terhadap 14 indikator satuan pemerintah daerah di Kabupaten Bintan, diketahui bahwa pada indikator pertama yaitu visi misi kepala daerah masih belum mencapai rumusan terhadap aktualisasi implementasi inovasi di daerah khususnya di Kabupaten Bintan. Namun begitu didalam penyusunan pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD Kabupaten Bintan 2016-2021 memiliki komponen terhadap inovasi daerah. Pemetaan inovasi daerah yang dilakukan dimulai sejak tahun 2019 untuk mengetahui kegiatan-kegiatan inovasi yang telah ada dalam proses penerapan hingga diusulkan terdapat inovasi yang diterima dan ditolak oleh Kemendagri. Untuk kualitas perizinan, saat ini Kabupaten Bintan dibawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki *One Stop Service* dalam rangka peningkatan pelayanan publik ditambah juga Bintan merupakan Kawasan *Free Trade Zone* memiliki mekanisme pelayanan perizinan berbeda dengan daerah lainnya.

Dari hasil penilaian 14 Indikator diketahui rankin terbaik adalah pada penghargaan bagi innovator. Salah satunya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten dalam kegiatan bursa inovasi desa. Selanjutnya, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, penopang struktur APBD Bintan yaitu sektor pariwisata terutama dari akomodasi dan juga sektor pajak daerah.

Hal penting dalam tantangan inovasi daerah di Kabupaten adalah mewujudkan ekosistem inovasi. Ini juga yang disampaikan Resen, M. G. S. K. (2015) terkait dengan refleksi dan pengaturan inovasi di Indonesia bahwa saat ini terdapat kecendrungan bahwa inovasi berjalan secara sporadis dan parsial, yang pada dasarnya inovasi mestinya terjadi dengan adanya kolaborasi antar aktor-aktor yang saling berinteraksi dalam suatu sistem yang disebut sebagai sistem inovasi.

Penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang diluncurkan pada tahun 2019 merupakan tonggak awal pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Bintan. Salah satu urgensinya adalah peran aktif dan kolaboratif dari jaringan SIDa. Jaringan SIDa Kabupaten Bintan dapat

dikembangkan dari enam pilar pemangku kepentingan penguatan SIDA, terdiri dari Perangkat Daerah, Universitas/Akademisi/ Politeknik, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Non Pemerintah Lainnya, Dunia Usaha/Dunia Industri, Komunitas Kreatif dan Media Massa. Enam pilar pemangku kepentingan penguatan SIDA ini terutama yang berada di wilayah Kabupaten Bintan yang menjadi perwakilan di Daerah.

Afiliasi lintas sektoral ini mengadopsi kerjasama *helix* yang saat ini sudah berkembang hingga menuju *penta helix* yaitu perguruan tinggi, business sector, media, komunitas masyarakat dan tentunya pemerintah untuk berkolaborasi dalam melakukan inovasi daerah. Menurut (Widjajani et al., 2016) berdasarkan pengalaman Eropa dalam membangun proyek inovasi Eropa yang dikenal sebagai *Creating Local Innovation in Quadruple Helix (CLIQ)* dan merupakan program dari Uni Eropa. Pemerintah Kabupaten Binta sejatinya dapat mendorong hal serupa dengan adanya *public private partnership*. (Yao et al., 2018) dalam penelitiannya melihat kesempatan pengembangan inovasi bahwa inovasi dimulai dengan penelitian, perbaikan terus-menerus, dan akhirnya ke dalam produksi dan komersialisasi oleh karena itu pengembangan ini tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri namun juga sektor bisnis sehingga kemanfaatannya akan lebih luas dan berkembang. Selain itu juga proses pengembangan ini dapat memanfaatkan *Corporate Social Responsibility (CSR)* antara pemerintah daerah dengan sektor bisnis.

Tidak hanya melulu fokus pada penganggaran pembangunan infrastruktur saja CSR ini dapat pula dialirkan untuk peningkatan daya saing daerah, bahkan (Simanungkalit & Prasajo, 2020) menjelaskan bahwa pelaksanaan inovasi daerah dapat memberikan dampak berdayaguna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemandirian daerah.

Penilaian Indikator Satuan Inovasi Daerah

Produk inovasi daerah Kabupaten Bintan yang diajukan didalam indeks inovasi daerah pada tahun 2020 sebanyak 69 inovasi yang kemudian dilakukan assessment kematangan dari setiap inovasi yang diajukan. 21 Indikator yang terdapat pada tabel 5 ini menjadi dasar terhadap setiap inovasi-inovasi daerah yang diusulkan kedalam indeks inovasi daerah.

Tabel 5. Hasil Penilaian Indikator Inovasi Kabupaten Bintan didalam Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020

No	Indikator	Ranking	Skor
1	Regulasi Inovasi Daerah	94	406
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	79	237
3	Dukungan Anggaran	63	530
4	Penggunaan IT	68	220
5	Bimtek Inovasi	95	102
6	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	43	556
7	Jejaring Inovasi	46	306
8	Replikasi	74	30
9	Pedoman Teknis	95	120
10	Pengelola Inovasi	62	194
11	Ketersediaan Informasi Layanan	59	254
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	61	174
13	Tingkat Partisipasi	53	192

No	Indikator	Ranking	Skor
	Stakeholder		
14	Kemudahan Informasi Layanan	62	198
15	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	73	344
16	Online Sistem	72	256
17	Kecepatan Inovasi	88	146
18	Kemanfaatan Inovasi	57	959
19	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	57	284
20	Sosialisasi Kebijakan	52	495
21	Kualitas Inovasi Daerah	36	1224

Sumber: *indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id*

Berdasarkan hasil review dan evaluasi yang dilakukan terhadap 69 inovasi yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan pada tahun 2020 diketahui pula bahwa terdapat 57 inovasi yang kemudian hasilnya diterima dan 12 inovasi ditolak. 57 Inovasi inilah yang kemudian dilakukan assessment kematangan dan verifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya dimasukkan didalam Indeks Inovasi Daerah secara nasional.

Pada dasarnya dalam rangka menggalang inisiatif inovasi daerah sebagaimana yang tercantum didalam PP 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah maka usulan inovasi daerah dapat berasal dari 5 (Lima) komponen mulai dari Kepala Daerah, DPRD, ASN, Perangkat Daerah hingga partisipasi dari masyarakat.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bintan memiliki komitmen secara legal-formal dengan terbitnya Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah. Perbub Bintan 48/2020 ini memuat beberapa hal penting seperti apa saja bentuk dan kriteria inovasi, proses tentang pengusulan, penetapan dan uji joba inovasi.

Sedangkan untuk bimtek inovasi masih tersentra pada bappelitbang bintan, tentu ini tidak mudah untuk menyebarkan inovasi daerah kepada setiap elemen yang menjadi target. Bappelitbang sebagai leading sector untuk perusahaan inovasi daerah di Kabupaten Bintan dalam beberapa tahun kebelakangan terus mendesiminasikan prospek inovasi daerah terutama kepada seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bintan. Pada tahun 2019 ini dimulai dengan menghadirkan narasumber dari Kemendagri untuk menyampaikan bagaimana proses inovasi daerah termasuk mensosialisasikan Puja Indah, selain daripada itu juga dengan Kerjasama pengalaman daerah lainnya. Salah satu Kabupaten yang menjadi percontohan awal pada saat forum Kelitbangan Kabupaten Bintan adalah Kabupaten Kulon Progo yang ikut hadir memberikan pemahaman kepada OPD di Kabupaten Bintan.

Untuk itu komitmen kepala daerah “good will” untuk pelaksanaan inovasi daerah dapat dilakukan dengan mewajibkan inovasi terhadap perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya masing-masing. Komitmen ini juga nanti didalam perangkat daerah mesti tertuang didalam dokumen perencanaan program dan kegiatan di rencana strategi OPD. Sehingga pada saat proses replikasi dilakukan oleh daerah lain ini akan memudahkan karena sudah terdapat role model yang ada.

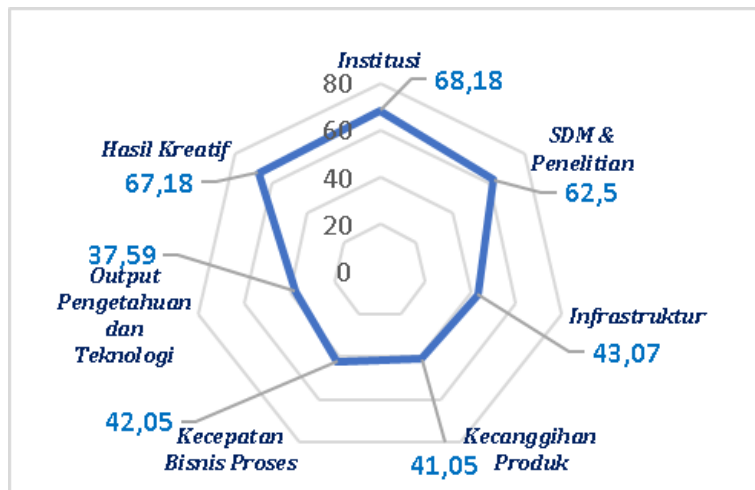
Disilainnya adanya pedoman teknis merupakan gerbang masuknya “pemahaman bersama” terhadap apa dan bagaimana inovasi akan dilakukan. Ini karena permasalahan terkait pelaksanaan inovasi daerah terkendala karena tidak pada “frekwensi” yang sama untuk melakukan pembaruan maupun mendorong lahirnya ide-ide inovasi.

Hasil evaluasi terhadap pedoman teknis yang ada memberikan kejelasan terhadap para innovator didalam ruang proses. Kendala yang sering dialami terutama dalam Selanjutnya juga

adanya dukungan anggaran, pemanfaatan teknologi informasi yang penting didalam pelaksanaan setiap inovasi daerah yang dilakukan. Catatan terhadap keduanya didalam pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Bintan memang masih mengandalkan alokasi dari APBD dalam implementasinya. Hal ini tentu kedepannya memerlukan sinergitas lintas sektoral dalam hal pembiayaan inovasi melalui dana sharing antara pemerintah dan sektor swasta terutama inovasi yang memberikan dampak terhadap industri maupun kelompok usaha misalnya UMKM.

Kabupaten Bintan dalam melakukan inovasi daerah berdasarkan hasil Indeks inovasi daerah pada tahun 2020 menempati peringkat 54 secara nasional dan masuk dalam kategori daerah terinovatif. Bahkan pemerintah daerah didalam penerapan hasil inovasi daerah dapat memberikan payung hukum melalui Peraturan Daerah (PERDA) ataupun Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) sehingga menjamin pengembangan lingkungan strategis penerapan inovasi daerah sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 PP 38 Tahun 2017.

Gambar 2. Hasil penilaian variable inovasi daerah Kabupaten Bintan tahun 2020



Selanjutnya terdapat 7 (Tujuh) variabel penilaian yaitu institusi, sumber daya manusia dan penelitian, infrastruktur, kecanggihan produk, kecepatan bisnis proses, output pengetahuan dan teknologi dan terakhir adalah hasil kreatif. Dari ketujuh aspek penilaian didalam indeks inovasi daerah tersebut kekuatan utama Kabupaten Bintan terletak pada institusi, hasil kreatif dan SDM-penelitian dengan nilai lebih dari 60. Sedangkan empat aspek lainnya masih dibawah terutanya adalah berkenaan dengan ouput pengetahuan dan teknologi yang hanya sebesar 37.59 tentunya masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Bintan dari setiap inovasi daerah yang ada mesti memberikan nilai tambah setiap masing-masingnya.

Dari hasil indeks inovasi daerah tahun 2020 dapat dilihat bahwa Kabupaten Bintan pada dasarnya mampu memetakan keberadaan inovasi daerah yang ada, meskipun ini dilaksanakan secara sporadic maupun parsial. Tahap awal pemetaan ini dilakukan dengan memetakan inovasi daerah eksisting di setiap OPD di Kabupaten Bintan. Kinerja inovasi daerah ini juga selajutnya bukan hanya tanggung jawab dari Bappelitbang namun juga merupakan usaha bersama dari seluruh elemen pemerintahan termasuk didalamnya masyarakat.

KESIMPULAN

Inovasi daerah pada dasarnya memainkan peranan penting didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik terutama pada saat gaung reformasi birokrasi pada tataran pemerintah daerah keberedaaan inovasi daerah sangat dibutuhkan. Namun begitu tantangan didalam menciptakan ekosistem inovasi daerah yang mumpuni mesti didukung aspek legal-formal melalui peraturan daerah ataupun komitmen kepala daerah melalui peraturan kepala daerah. selain itu juga yang disoroti dari hasil ini setiap daerah pada dasarnya memiliki inovasi-inovasi yang juga perlu ditingkatkan pembaharuannya dan tidak mesti semuanya mekanisme digital. Salah kaprah yang dihadapi oleh lingkungan implementor inovasi daerah ini juga mesti diluruskan agar lingkup dari inovasi daerah menjadi lebih baik. Ditambah lagi terdokumentasinya inovasi daerah disetiap usulan juga mesti diperhatikan karena ini menjadi kelengkapan pelaksanaan inovasi daerah. Kabupaten Bintan dalam penerapan inovasi pada dasarnya dari analisa pemetaan di tahun 2020 masih melakukan eksplorasi terhadap bentuk-bentuk inovasi baik itu yang dilakukan oleh perangkat daerah maupun masyarakat. "Pekerjaan Rumah" bagi pemerintah Kabupaten Bintan dalam melakukan inovasi berdasarkan hasil pemetaan pada tataran kelembagaan yang perlu didorong daya gedor pelaksanaan inovasi oleh ASN maupun masyarakat sebagaimana yang terdapat didalam PP 38 Tahun 2017.

SARAN

Untuk optimalisasi pelaksanaan inovasi daerah dibutuhkan dukungan regulasi untuk memastikan bahwa cipta kondisi inovasi terselenggara. Selanjutnya dengan adanya Sistem Inovasi Daerah pada dasarnya menjadi landasan terhadap pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Bintan. Keterlibatan lintas sektoral didalam melakukan inovasi juga mesti diperhatikan dalam hal partisipasi serta peran aktif. Dalam 35 indikator penilaian indeks inovasi daerah baik itu pada indikator SPD maupun indikator inovasi daerah kelengkapan dari setiap inovasi daerah menjadi catatan penting dari hasil penilaian terhadap Kabupaten Bintan. Menyamakan persepsi setiap innovator dikalangan OPD juga menjadi pekerjaan penting kedepannya. Bahwa tidak hanya Bappelitbang yang menjadi leading didalam pelaksanaan inovasi namun bisa dilaksanakan melalui "One Office One Innovation". Selain itu juga dari sisi kualitas mesti diperhatikan karena ini menjadi variabel penilaian. Jika saat ini secara kuantitas jumlah inovasi daerah yang ada sudah cukup banyak namun juga kualitasnya berdasarkan hasil review dan assessment dari Kementerian Dalam Negeri menjadi tolak ukur dalam pemerintah Kabupaten Bintan melakukan evaluasi mendasar terhadap inovasi-inovasi yang telah dilakukan hingga tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, B. (2014). Kelemahan Regulasi dan Kebijakan Tumpukan Inovasi Pembangunan Daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*, *II(2)*, 51–67. <http://www.lekad.org/content/kelemahan-regulasi-dan-kebijakan-tumpukan-inovasi-pembangunan-daerah>
- Andhika, L. R. (2018). Element and Factor Governance Innovation in Government Public Service. *Jurnal Balitbangda*, *6(3)*, 207–222.
- Anggraeni, S. K., Sukardi, S., & Raharja, S. (2021). Strategi Penguatan Sistem Inovasi Unit Pengolahan Ikan di Provinsi Banten. *Journal Industrial Servicess*, *6(2)*, 216-222.
- Arifin, M. Z., & Sakti, A. B. (2017). Peran Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang dalam Menumbuhkembangkan Inovasi Daerah. *The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang Peran*, 1.
- Aulia, P., Nurani, F., & Publik, A. (2019). *Gaya Kepemimpinan Terhadap Lahirnya Inovasi Daerah (Studi pada Daerah Inovatif Versi Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2019)*.
- Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2018). *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*. 1–215. <http://repository.lppm.unila.ac.id>
- Kartika, R. S. (2018). PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN INOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) TAHUN 2017 (DEVELOPMENT OF TECHNICAL INSTRUCTIONS INOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA) ASSESSMENT 2017). *Inovasi*, *15(2)*. <https://doi.org/10.33626/inovasi.v15i2.53>
- Kunariyanti, D., & Yuwono, T. (2019). Inovasi Pemerintah Daerah Berbasis Kolaborasi, Bandung Creative City. *Journal of Politic and Government Studies*, *8(04)*, 231. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/issue/view/1339>
- Matridi, R. A., Budiman, S., Ferizone, F., Rianto, F., Setyadiharja, R., & Kurniadi, D. (2021). Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Bintan. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, *4(1)*, 42-54.
- Mukhlis, B. M. (2018). Kolaborasi antara universitas, industri dan pemerintah dalam meningkatkan inovasi dan kesejahteraan masyarakat: Konsep, implementasi dan tantangan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, *1(1)*, 31-43.
- Muzaqi, A. H., & Hanum, F. (2020). Model Quadruple Helix dalam Pemberdayaan Perekonomian Lokal Berbasis Desa Wisata di Desa Duren Sari Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, *4(2)*, 673-691.
- Prasetyo, A. (2020). *Prosiding SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS Fakultas Ekonomi Universitas Tidar KOMPARASI PROSES INOVASI DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DAN DAYA SAING DAERAH*. 309–325. <https://www.researchgate.net/publication/339887322>
- Simanungkalit, D. J., & Prasajo, E. (2020). Peran Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dalam mengimplementasikan inovasi daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. In *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* (Vol. 5, Issue 2). <https://doi.org/10.33701/JIPSK.V5I2.1268>
- Sururi, A. (2019). Inovasi Kebijakan Publik. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53(9)*, 1689–1699.
- Syamsuddin, R., Ikram, M., & Fuady, N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *4(1)*, 63–79. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.326>
- Wicaksono, K. W. (2019). TIPOLOGI INOVASI SEKTOR PUBLIK PADA TIGA PROGRAM INOVATIF PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA (Tinjauan Reflektif terhadap Tiga Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2018). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, *1(2)*, 196. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i2.19895>
- Widjajani, Fajarwati, A., & Hidayat, As. (2016). Model Quadruple Helix Sebagai Model Inovasi Daerah (Kajian Literatur). *Sosiohumanitas Journal. Jurnal-Jurnal Humaniora*, *Vol 18, No.1. Universitas Langlangbuana, Bandung.*, 85–95.
- Wismanu, R. E., Nuh, M., Widodo, N., & Aziz, N. A. (2018). Model Inovasi Pemerintah Daerah

- Bidang Pelayanan Perizinan dalam Mewujudkan Smart City (Studi Pendekatan Sistem Dinamik pada Pemerintah Kabupaten Sragen). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(4), 369–376. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2018.004.04.12>
- Yao, W., Li, H., & Weng, M. (2018). The Role the University Could Play in an Inclusive Regional Innovation System. *Triple Helix*, 5(1), 1–21. <https://doi.org/10.1186/s40604-018-0058-4>
- Yusuf, A. A., Muhamad, H., Tinggi, S., Panca, I. A., Palu, M., & Program Doktor, M. (2019). Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palu dalam Riset dan Inovasi Pembangunan Daya Saing Daerah. In *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi* (Vol. 3, Issue 1). <http://180.250.247.102/conference/index.php/knia/article/view/14>